



# JANGAN MEMBAKAR SAMPAH

■ Sultan Minta Daerah Bertindak Tegas



*Ya, silakan (ditindak) itu  
wewenang kabupaten, bukan  
wewenang saya.*

Sri Sultan HB X

**YOGYA, TRIBUN** - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mempersilakan pemerintah kabupaten/kota untuk memberlakukan sanksi bagi warga yang membakar sampah. Saat ini Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul tengah menghadapi permasalahan lingkungan terkait dengan polusi udara dan kekaruturan pengelolaan sampah.

Hal tersebut disebabkan karena penutupan sementara TPA Piyungan karena mengalami kelebihan kapasitas. Kondisi ini membuat masyarakat memilih untuk membakar dan membuang sampahnya secara sembarangan karena tempat penampungan sampah diperalihkan terbatas.

Menurut Sultan, kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap warga yang membakar sampah berada di pemerintah kabupaten/kota, bukan Penda DIY. "Ya, silakan (ditindak) itu wewenang kabupaten, bukan wewenang saya," ucap Sultan kepada awak media saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (25/8).

Menurut Raja Keraton Yogyakarta ini, kabupaten/kota harus mau belajar untuk mengelola sampah di wilayahnya. Begitu pula masyarakat. Dengan adanya penutupan TPA Piyungan tersebut, menurut Sultan dapat memaksa kabupaten kota

● ke halaman 11

## Jangan Membakar

● Sambungan Hal 1

untuk mulai mengelola sampahnya secara mandiri.

Sebab selama ini sampah yang dibuang ke TPA Piyungan tidak dilakukan pengolahan di level kabupaten/kota sehingga volume sampah yang masuk selalu meningkat tiap tahunnya. "Pokoknya sampah bukan wewenang saya. Soalnya kalau enggak dibegitukan (tutup TPA Piyungan) kota dan kabupaten, ya, enggak mau belajar masyarakatnya enggak mau belajar," ujar Sultan. "Ya, sekarang teresrah kabupaten mau ditindak apa tidak," sambung Sultan.

### Jangan manja

Sultan menegaskan jika pengelolaan sampah yang diproduksi masyarakat berada di tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Sementara, Pemda DIY hanya sebatas memfasilitasi. "Selama ini kan masyarakat sudah terlalu manja, kabupaten kota, ya, manja. *Apa-apa karepe* (inginnya diatur) provinsi, sedangkan wewenang (pengelolaan sampah) itu di peraturan, kan, tanggung jawabnya kabupaten kota," tutur Sultan.

Sultan melanjutkan, pembatasan operasional TPA Piyungan saat ini juga menjadi momentum untuk mengedukasi pemerintah di tingkat kabupaten/kota serta masyarakat terkait penanganan sampah. Saat ini kabupaten/kota, khususnya Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta berangsur-angsur dapat mengelola sampahnya secara mandiri, se-

hingga yang dibuang ke TPA hanyalah sampah residu.

"Sudah sekian puluh tahun difasilitasi, begitu ditutup bingung *dewe*. Kan gitu biarin saja. Kita juga harus mendidik masyarakat jangan dimanjakan," ucapnya. "Nah, dari hasil akhir, akhirnya juga di tiga kabupaten/kota mereka mau berdiri sendiri," sambung Sultan.

Peringatan kondisi kritis TPA Piyungan menurut Sultan telah diberitahukan sejak 2 tahun lalu. Artinya, wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul telah memiliki waktu yang cukup untuk berbenah dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun, hal itu tak kunjung dilakukan hingga TPA Piyungan mengalami kelebihan kapasitas. "Empat bulan sebelumnya juga kita kasih tahu kalau mau tutup, ya, tak tutup. Karena kewenangan kan di kabupaten/kota terpaksa kita tutup. Nanti kalau enggak berubah, yo, tak tutup *meneh* gitu, tapi nyatanya kan bisa," jelasnya.

Sultan pun mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten/kota yang kini sudah sanggup mengelola sampahnya. Misalnya Kota Yogyakarta yang telah memiliki dua mesin pengolah sampah dengan kapasitas masing-masing sebesar 80 ton. "Jadi tahun ini kota ada dua mesin per hari 1 kali mesin 80 ton, jadi dua mesin 160 ton. Bantul juga begitu. Sleman juga begitu. *Nyatane iso*, ya udah biarin aja wong memang wewengangnya bellau kok," ujar Sultan.

### Antre di depo

Video memperlihatkan

sejumlah warga mengantre dan menantikan truk pengangkut sampah kembali beredar di media sosial, Jumat (25/8). Video tersebut dibagikan oleh akun @merapi\_uncover, di mana lokasinya diketahui berada di Depo Jalan Brigjen Katamso.

Menyikapi hal itu, Sub Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Mareta Hexa Sevana mengatakan, selama TPA Piyungan belum beroperasi normal, depo pun tidak dibuka 24 jam. Sebab, jika dioperasikan menyeluruh, otomatis dalam satu hari depo-depo tersebut langsung penuh dan sampah membeludak sampai ke jalanan.

"Dalam kondisi normal, seluruh sampah dari Kota Yogyakarta yang biasanya terangkut habis dan harus dibawa ke TPA itu 60-70 truk per hari, dengan jadwal buka TPA 10 jam," katanya, Jumat (25/8/23). "Nah, saat situasi darurat begini, kami hanya diperbolehkan mengirim armada ke sana maksimal 20 unit. Sementara jam buka TPA sekarang hanya terbatas 1 jam per hari," imbuh Mareta.

Oleh sebab itu, DLH pun harus memutar otak untuk mengatur armada yang harus diberangkatkan setiap harinya, sekaligus 'menyembunyikan' sementara sampah-sampah yang belum dapat terangkut. "Karena jika seluruh depo dibuka tanpa batasan, akhirnya warga membuang dengan tanpa batasan juga dan upaya pengurangan sampahnya menjadi tidak optimal," je-

lasnya.

Mareta berharap, warga yang membawa sampah menuju depo bisa memastikan limbahnya dalam kondisi sudah terpilah. Sebab, ketika petugas harus melakukan pemeriksaan satu per satu, maka membutuhkan waktu panjang dan membuat antrean di depo semakin mengular.

Dicontohkannya, metode pembuangan semacam itu sejatinya juga sudah diterapkan di Taiwan, di mana pengangkut limbah tidak masuk ke lingkungan warga dan hanya disediakan truk di satu titik. Kemudian, di truk tersebut disediakan tempat khusus untuk memisahkan sampah sesuai jenisnya. "Kondisi di Kota Yogya, harusnya sampah yang masuk armada hanya khusus residu, seperti pembalut, popok bekas, *styrofoam*, dan lain-lain, yang benar-benar sulit didaur ulang," cetusnya.

Sementara, untuk jenis anorganik memang tidak disediakan tempat, karena sejak awal 2023 sudah digencarkan gerakan *zero* sampah anorganik. Lalu, limbah jenis organik diharapkan bisa habis di level rumah tangga melalui gerakan *Mibah Dirjo* (Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja).

"Jenis sampah yang dibawa hanya residu saja dan khusus residu plastik bisa diletakkan secara terpisah di wadah yang sudah kami sediakan. Armada hanya untuk mengangkut sampah residu yang tidak dapat didaur ulang lagi," pungkasnya. (tro/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005